

DPRD KAWAL SPMR



EDISI JULI 2025

FREE

Pengantar

Pembina/Penasehat

Ketua DPRD Kota Makassar

Supratman

Wakil Ketua I

Andi Suharmika, S.H

Wakil Ketua II

Anwar Faruq, S.Kom

Wakil Ketua III

Eric Horas, SE., MM

Ketua Komisi A

Andi Pahlevi, SE, MM

Ketua Komisi B

Ismail, S.H

Ketua Komisi C

Azwar Rasmin

Ketua Komisi D

Ari Ashari Ilham, S.E

Pengarah: Plt. Sekretaris DPRD

Kota Makassar

ANDI RAHMAT M.

Penanggung Jawab

PPID Pembantu Sekretariat DPRD

Kota Makassar

Kabag Persidangan

Dr. Hj. Widiawati Said, S.Sos.,

S.Pd

Kabag Humas dan Protokol

Syaril, S.STP

Kabag Keuangan

Abdul Kadir, SE, MM

Kabag Umum

Dr. Muhajir, S.KM., M.Kes

ALAMAT KANTOR

DPDR Kota Makassar

Jl. Andi Pangeran Pettarani, Blok E
NO. 1-2 Tidung, Kec Rappocini, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan

Salam Sejahtera

Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, Majalah DPRD Kota Makassar edisi Juli 2025 kembali hadir sebagai media informasi dan komunikasi publik mengenai dinamika kerja-kerja legislatif dalam mengawal kepentingan masyarakat.

Edisi kali ini secara khusus menyoroti perkembangan dunia pendidikan di Kota Makassar. Mulai dari proses pengawasan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di tingkat SD dan SMP, hingga pelaksanaan program penyaluran Seragam Sekolah Gratis, program prioritas yang digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham.

Selain tema utama pendidikan, majalah ini juga memuat rangkaian agenda DPRD Kota Makassar, mulai dari kegiatan sosialisasi peraturan daerah, penerimaan aspirasi masyarakat melalui rapat, hingga pengawalan isu-isu strategis yang berkembang di tengah warga. Harapan kami, majalah ini dapat menjadi sarana edukasi publik sekaligus penghubung yang memperkuat komunikasi antara DPRD dan warga Makassar.

Selamat membaca.

Makassar, 31 Juli 2025

Daftar Isi

BERANDA PARLEMEN 04-09

- DPRD Makassar Nilai Serapan Anggaran Pemkot Belum Maksima
- DPRD Makassar Setujui Ranperda RPJMD dan Pertanggungjawaban APBD
- DPRD Makassar Terima Kunjungan Bupati dan Ketua DPRD Tojo Una-Una
- DPRD Makassar Hadiri Rapat Pemantapan Rancangan Produk Hukum Daerah
- Ketua Fraksi PKS DPRD Makassar Hadiri Peresmian Pabrik Cokelat PT Agrinesia Raya
- DPRD Makassar Terima Aspirasi Sapma PP, Protes Dugaan Arogansi Ritel Modern

KOMISI 10-14

- Komisi B Desak Pembenahan Pasar Terong agar Pedagang Jalan Sawi Bisa Direlokasi
- Komisi A Soroti Rendahnya Realisasi Program SKPD
- Komisi D Dorong Bank Hapus Potongan Insentif Pekerja Keagamaan
- Komisi B: Penataan Pasar Cidu Jangan Rugikan Usaha Warga
- Temui Munafri, Komisi D Sampaikan Kondisi Ketimpangan Akses Pendidikan

FRAKSI 15-16

- Fraksi PPP Siap Bersinergi dengan Pemkot Makassar
- Fraksi PKS Tinjau Dampak Reformasi Perumda terhadap Peningkatan PAD

SOSPER 17-24

- Andi Makmur Burhanuddin Tegaskan Komitmen terhadap Dunia
- Adi Akbar Sosialisasikan Perda Penyelenggaraan Pendidikan
- Idris Gelar Sosialisasi Perda Perlindungan Masyarakat
- Sosialisasi Perda Kepemudaan, Anwar Faruq Ajak Pemuda Aktif Bangun Makassar

- Muhammad Farid Rayendra: Perda Pengawasan Alkohol Harus Ditegakkan Bersama
- Nasir Rurung Tekankan Pentingnya ASI Eksklusif untuk Anak
- Hj Irmawati Sila Dorong Pemuda Melek Regulasi
- Meinsani Kecca Ajak Warga Makassar Jaga Ruang Terbuka Hijau

ASPIRASI 25-30

- Fahrizal Arrahman Husain Dorong Solusi untuk Siswa Tak Lulus SPMB
- Ray Minta Pemkot Terlibat dalam Pengembangan Pusat Kuliner Pasar Cidu
- Solusi Urai Kemacetan, Legislator Dukung Pembangunan Jembatan Barombong
- Tri Sulkarnain Soroti Lemahnya Penyelesaian Sengketa Tanah
- Transparansi SPMB Tuai Sorotan Legislator Ari Ashari Ilham
- Muchlis Misbah Harap Penambahan Kuota Rombel Dapat Terwujud

METRO 31-33

- Disdik Makassar Pastikan SPMB 2025 Transparan, Tak Ada Titip-Menitip
- Pemkot Makassar Salurkan Seragam Sekolah Gratis, Munafri: Bantu Ringankan Beban Orang Tua

NASIONAL 34-35

- Prabowo Soroti Praktik Ekonomi yang Menyimpang
- Debut Global Indonesia di BRICS, Prabowo Tancapkan Pengaruh Internasional

LIFE STYLE 36-37

- Manfaat Air Kelapa untuk yang Suka Jogging
- Mengapa Orang Hobi Mengoleksi Prangko?

PROFIL 38-39

- Profil Rahmat Taqwa Quraisy, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar

DPRD

Makassar Nilai Serapan Anggaran Pemkot Belum Maksimal

Sejumlah fraksi di DPRD Kota Makassar menyoroiti lemahnya serapan anggaran pembangunan dalam Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang digelar pada Selasa (1/7/2025).

Paripurna tersebut merupakan agenda resmi DPRD dalam mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Makassar mengenai Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024.

Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, turut menanggapi kondisi serapan anggaran yang dinilai masih rendah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) terbaru.

Namun ia menegaskan, hal tersebut bukan disebabkan oleh penahanan anggaran, melainkan karena adanya efisiensi yang diterapkan Pemkot Makassar.

“Tapi kan setelah pelantikan skema baru yang dilakukan Pak Wali Kota pasti sudah mulai banyak yang berjalan,” ujarnya.

“Tapi bukan menahan anggaran, tapi efisiensi anggaran ini cukup menarik karena banyak anggaran yang harusnya hanya terbuang percuma itu lebih efektif penempatannya,” tambahnya.

Ia menambahkan bahwa saat ini “mesin pemerintahan” Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin sudah lebih baik dari sebelumnya, apalagi baru-baru ini Munafri telah melantik puluhan pejabat baru. Supratman berharap realisasi anggaran bisa ditingkatkan pada tahun ini.



DPRD Makassar Setujui Ranperda RPJMD dan Pertanggungjawaban APBD



DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Kedua Belas Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025 dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan pertanggungjawaban APBD 2024 di ruang paripurna DPRD Makassar, Rabu (16/7/2025).

Rapat ini dipimpin langsung oleh unsur pimpinan DPRD dan dihadiri oleh Wali Kota Makassar, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kota Makassar.

Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui dua rancangan peraturan daerah (ranperda), yakni Ranperda RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan pertanggungjawaban APBD 2024 di ruang paripurna DPRD Makassar.

Fraksi Mulia melalui juru bicaranya, Muchlis A. Misbah, menyatakan menerima dan menyetujui kedua ranperda tersebut setelah melalui proses pembahasan yang intensif

dan mendalam bersama jajaran pemerintah kota. Ia menyebut RPJMD ini sebagai pedoman penting dalam pembangunan lima tahun ke depan.

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Idris, menggarisbawahi pentingnya perhatian pemerintah terhadap nasib tenaga kontrak yang dirumahkan, serta optimalisasi peran talenta lokal dalam proyek strategis.

“Fraksi Gerindra menilai penting agar seluruh program pembangunan berpihak pada kepentingan rakyat. RPJMD harus menjamin pemenuhan hak dasar warga, termasuk ekonomi kerakyatan melalui penguatan UMKM,” tegas Idris.

Sementara itu, Fraksi API melalui juru bicaranya, Nasir Rurung, menyoroti beberapa persoalan krusial di lapangan. Ia menilai perizinan belum sepenuhnya mengacu pada dokumen tata ruang pemerintah, sehingga berdampak pada munculnya lapak-lapak liar di jalan protokol yang memicu kesan kumuh di Kota Makassar.

“Perizinan tidak mengacu dokumen tata ruang pemerintah. Adanya pembiaran lahirnya kapak lapak jalan protokol melahirkan kekumuhan Makassar,” ujarnya.



DPRD Makassar Terima Kunjungan Bupati dan Ketua DPRD Tojo Una-Una

Anggota DPRD Kota Makassar, Basdir dan Dr. Fahrizal, bersama Plt. Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, menerima kunjungan silaturahmi dari Bupati Tojo Una-Una Ilham L, SH, Ketua DPRD Tojo Una-Una Gusnar A Sulaeman, SE., MM, serta jajaran staf Sekretariat DPRD Tojo Una-Una.

Pembahasan dalam pertemuan tersebut mengenai P3K mencakup tantangan dalam proses pengangkatan, penyebaran formasi, hingga aspek anggaran dan kesejahteraan pegawai. Kedua pihak saling bertukar pandangan serta strategi yang telah dijalankan di masing-masing daerah untuk memastikan pengelolaan P3K berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Kunjungan ini berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan menjadi momen penting untuk mempererat hubungan antar lembaga legislatif dan eksekutif antar daerah. Selain ajang silaturahmi, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk saling bertukar informasi dan pengalaman terkait pelaksanaan tugas-tugas kedewanan dan pemerintahan.

Pihak DPRD Kota Makassar menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini dan berharap sinergi lintas daerah seperti ini dapat terus terjalin demi mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal.

DPRD Makassar Hadiri Rapat Pemantapan Rancangan Produk Hukum Daerah

DPRD Kota Makassar menghadiri Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Selatan.

Rapat tersebut membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan satu Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Makassar, masing-masing:

Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren; Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

Rancangan Perwali tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dari DPRD Kota Makassar, hadir Hartono, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan Irwan Djafar, SE, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar. Hadir pula Andi Rahmat, S.STP, M.Si, Plt.Sekretaris DPRD Kota Makassar yang turut mendampingi proses harmonisasi ini.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pihak terkait dari Pemerintah Kota Makassar, di antaranya Kepala Dinas Kearsipan, Kepala Bagian Hukum, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Makassar.

Sementara dari Kanwil Kemenkumham Sulsel, hadir Heny Widyawati, SH, MH, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta para perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum. Turut hadir pula Dr. Sakka Patih, SH, MH, dari tim penyusun rancangan regulasi.

Rapat harmonisasi ini merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Melalui proses ini, dilakukan pengkajian secara menyeluruh agar substansi regulasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

DPRD Kota Makassar berharap melalui proses harmonisasi ini, produk hukum daerah yang dihasilkan akan lebih berkualitas, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Makassar secara menyeluruh.





Ketua Fraksi PKS DPRD Makassar Hadiri Peresmian Pabrik Cokelat PT Agronesia Raya

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Makassar Andi Hadir Ibrahim Baso turut menghadiri peresmian pengoperasian pabrik cokelat milik PT Agronesia Raya yang berlokasi di Kawasan Industri Makassar (KIMA), Jumat (25/7/2025).

Kehadiran Andi Hadi tidak sekadar sebagai undangan, tetapi sebagai bentuk komitmen dalam mendorong pertumbuhan industri lokal yang mampu membuka lapangan kerja dan mendorong kemajuan ekonomi masyarakat. Ia memberikan apresiasi atas hadirnya industri makanan berskala nasional di Kota Makassar.

“Kita harapkan kehadiran pabrik ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memberi ruang sebesar-besarnya bagi tenaga kerja lokal dan pelaku UMKM untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri ini,” ujarnya.

Pabrik cokelat ini diresmikan langsung oleh Wali Kota Makassar Munafriz Arifuddin. Dalam sambutannya, menegaskan bahwa Makassar akan terus bergerak sebagai kota industri dan kuliner, dengan hadirnya PT Agronesia Raya sebagai langkah strategis untuk penguatan ekonomi kerakyatan.

“Ini bukan sekadar soal produksi makanan, tapi peluang besar membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi rakyat,” ujarnya. Ia juga mendorong pihak perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.

Andi Hadi Ibrahim Baso menyatakan siap bersinergi dengan Pemerintah Kota untuk memastikan kebijakan industri yang berpihak pada rakyat dapat terus didorong melalui fungsi pengawasan dan legislasi DPRD.

DPRD Makassar Terima Aspirasi Sapma PP, Protes Dugaan Arogansi Ritel Modern

Sekelompok massa dari Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila (PP) Kota Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Makassar, Senin (28/7/2025).

Mereka menuntut pertanggungjawaban pihak manajemen salah satu ritel modern, Alfamidi atas dugaan tindakan sewenang-wenang terhadap salah satu warga Makassar.

Aksi tersebut dipicu oleh insiden pada Sabtu malam, 19 Juli 2025, di mana seorang warga bernama Putra bersama rekannya Cici dituduh mencuri saat berbelanja di salah satu gerai Alfamidi.

Padahal, setelah diperiksa melalui rekaman CCTV, tuduhan tersebut tidak terbukti. Ketua SAPMA PP Kota Makassar, Husnul Mubarak, menyebut insiden itu sebagai bentuk arogansi pihak Alfamidi

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menyatakan pihaknya akan mengagendakan pemanggilan terhadap manajemen seluruh jaringan ritel besar, termasuk Alfamidi, Alfamart, dan Indomaret.

“Kami akan periksa semua perizinan dan kewajiban pajak mereka. Ini bukan hanya soal permintaan maaf, tetapi soal ketaatan mereka sebagai pelaku usaha di Kota Makassar,” ujar Hartono di hadapan massa aksi.

Sementara itu, legislator lainnya, Basdir menegaskan, RDP antara DPRD Makassar, manajemen Alfamidi, dan perwakilan SAPMA PP dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat untuk mengurai persoalan ini secara terbuka.



Komisi B Desak Pembenahan Pasar Terong agar Pedagang Jalan Sawi Bisa Direlokasi

Rencana relokasi ratusan pedagang Jalan Sawi ke gedung Pasar Terong mendapat penolakan. Mayoritas pedagang keberatan karena kondisi gedung relokasi dianggap tidak layak huni untuk berjualan.

Namun di sisi lain, selama ini para pedagang diketahui menempati fasilitas umum milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang. Pihak BBWS meminta agar tidak ada lagi aktivitas jual-beli di atas aset miliknya.

Merespons polemik tersebut, Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (8/7/2025), dengan menghadirkan perwakilan pedagang, BBWS Pompengan Jeneberang, PD Pasar, serta instansi pemerintah terkait.

Dalam rapat tersebut, Komisi B DPRD Kota Makassar berupaya mencari jalan tengah. Anggota Komisi B, Hartono, menyebut bahwa kedua pihak memiliki kepentingan yang sah dan perlu ada kompromi.

"Saya kira kepentingan Balai Besar menertibkan aset dalam penguasaan mereka dan teman-teman pedagang berjualan sepanjang lokasi itu masing-masing punya kepentingan dan bagaimana cara mengkompromikan ini. Saya percaya ada solusi yang terbaik," ujarnya.

Anggota Komisi B lainnya, Basdir, menambahkan bahwa BBWS memang memiliki kewajiban menjaga dan mengamankan aset negara. Namun di saat yang sama, negara juga bertanggung jawab melindungi warganya dalam mencari nafkah.

"Solusinya adalah pedagang masuk kembali ke pasar dan lantai satu dibenahi. Kalau mau direlokasi di situ, harus ada pembenahan dan ada strategi agar Pasar Terong kembali jadi ramai dan nyaman," jelasnya.

Komisi A

Soroti Rendahnya Realisasi Program SKPD



Komisi A DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya capaian realisasi program kerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih di bawah 50 persen dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2025 yang digelar di ruang Komisi A DPRD Makassar, Jumat, 11 Juli 2025.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Andi Pahlevi, dan Haji Irwan Djafar beserta anggota Komisi A lainnya, termasuk Tri Sulkarnaen. Hadir pula perwakilan dari SKPD mitra kerja Komisi A dalam forum evaluasi rutin ini.

Dalam keterangannya usai rapat, Tri Sulkarnaen menyayangkan lambannya progres pelaksanaan program. Ia menekankan bahwa memasuki triwulan ketiga seharusnya capaian program sudah menembus angka 50 persen.

"Ini sudah triwulan ketiga, tetapi capaian masih di bawah 50 persen. Kalau begini, dikhawatirkan pengelolaan program di akhir -

tahun bisa tergesa-gesa dan berisiko merugikan pemerintah kota maupun masyarakat," ujarnya.

Ia juga menyoroti perlunya keseriusan dari SKPD dalam merealisasikan anggaran dan kegiatan agar tidak terjadi akumulasi pekerjaan di akhir tahun anggaran. "Kalau dibiarkan, bukan hanya kinerja yang terhambat, tapi pelaksanaan APBD pun jadi tidak optimal," lanjutnya.

Salah satu catatan penting dari rapat tersebut adalah permasalahan di Dinas Kominfo Makassar. Disebutkan bahwa terdapat anggaran protokoler yang sudah tidak dapat dimanfaatkan karena terjadi pergeseran fungsi dan kebijakan internal. Hal ini dinilai sebagai bentuk ketidaksiapan dalam perencanaan awal program.

"Ke depan, perencanaan harus lebih matang. Jangan sampai anggaran yang ada tidak bisa digunakan karena perubahan struktur kegiatan. Ini akan berdampak pada efektivitas layanan publik," tegas Tri sapaannya.



Komisi D Dorong Bank Hapus Potongan Insentif Pekerja Keagamaan

Sejumlah pekerja keagamaan di Kota Makassar menyampaikan protes terhadap potongan dana hibah atau insentif yang mereka terima setiap bulan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Bank BPD Sulselbar.

Dari nominal Rp250.000 per bulan, mereka hanya menerima Rp210.000 akibat adanya potongan sebesar Rp40.000 yang disebut sebagai iuran atau biaya administrasi bank.

Menanggapi keluhan tersebut, Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan perwakilan pekerja keagamaan, pihak Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Makassar, serta pihak Bank BPD Sulselbar.

Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, menjelaskan bahwa forum RDP bertujuan untuk mempertemukan para pihak guna mencari solusi yang adil.

“kita sudah pertemuan antara pihak Bank BPD dengan Kabag Kesra karena ada iuran atau admin bank. Yang dimana dikeluhkan dari teman-teman pekerja agama bahwa insentifnya itu kan, atau hibahnya itu kan cuma 250 ribu per bulan,” ungkap Ari.

Ari menambahkan bahwa potongan sebesar Rp40.000 tersebut cukup banyak, mengingat nilai bantuan untuk pekerja keagamaan relatif kecil. Namun dalam pertemuan tersebut, kata dia, telah ditemukan solusi sementara.

“Tapi tadi kami sudah pertemuan antara pihak BPD dan Kabag Kesra. Itu ada saja solusinya, bahwa akan dimigrasi tabungannya. Yang tadi menjadi tabungan mandiri, dialihkan menjadi tabunganku yang tidak ada admin banknya,” jelasnya

Komisi B: Penataan Pasar Cidu Jangan Rugikan Usaha Warga

Rencana penerapan sistem ganjil-genap pada malam hari di kawasan pusat kuliner Pasar Cidu, Jalan Tinumbu, Kota Makassar, menuai penolakan keras dari para pedagang.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Makassar, Senin (28/7/2025), mereka menyuarakan kekhawatiran akan kehilangan mata pencaharian jika aturan itu diberlakukan.

Rencana itu mencakup penggiliran jadwal berjualan antara pedagang di sisi kiri dan kanan jalan. Namun, menurut para pedagang, skema ini justru akan memotong separuh hari berdagang mereka.

"Dengan ganjil genap ini 10 hari saya tidak menjual, itu sudah merugikan. Jadi betul-betul untuk kebutuhan sehari-hari saya itu apa namanya susah untuk kalau betul-betul kalau ganjil genap diterapkan," keluhnya mewakili para pedagang.

Penolakan para pedagang mendapat dukungan dari Komisi B DPRD Makassar. Anggota Komisi, Basdir, menegaskan bahwa penataan tidak boleh dilakukan dengan cara yang mematikan usaha warga.



"Pada prinsipnya ini mereka sebenarnya bukan apa tidak mau ditata tapi mereka tidak mau digusur. Jadi kalau dianggap macet resolusinya bukan digusur. Kalau dianggap terlalu banyak memakan tempat kasih mundur sedikit (jualannya) kan begitu," ujarnya.

Anggota Komisi B lainnya, Hartono, juga setuju pentingnya proses penataan pasar dilakukan secara manusiawi tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat kecil. Hartono juga menyarankan agar solusi alternatif seperti pengaturan lokasi atau waktu operasional bisa menjadi opsi agar pedagang tetap berjualan tanpa menimbulkan kemacetan.





Temui Munafri, Komisi D Sampaikan Kondisi Ketimpangan Akses Pendidikan

Wali Kota Makassar bersama Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), menerima silaturahmi Komisi D DPRD Kota Makassar, di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (24/07/2025).

Hadir dalam pertemuan tersebut, dipimpin langsung oleh Ari Ashari Ilham (Ketua Komisi), didampingi Andi Suhada Sappaile, Rezki Nur, A Odhika Cakra Satriawan, Eshin Usami Nur Rahman, Adi Akbar, Budi Hastuti.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan pemerintah Kota lewat Dinas Pendidikan mengoptimalkan pemanfaatan sekolah-sekolah yang selama ini kurang diminati, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan sekolah swasta sebagai alternatif solusi.

“Komitmen Pemerintah Kota untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari hak mendapatkan pendidikan, terutama akibat ketidaktersediaan di sekolah negeri,” ujar Munafri, didampingi Aliyah, usai menerima rombongan Komisi D, DPRD Makassar.

Pada kesempatan ini, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menyambut positif langkah diambil Pemkot Makassar. Ia menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh kebijakan Wali Kota, namun mengingatkan masih terdapat ketimpangan akses di beberapa wilayah.

“Beberapa sekolah negeri masih memiliki daya tampung besar, tapi di daerah seperti Mamajang, Mariso dan Tamalate, akses ke sekolah sangat terbatas,” ungkapnya.

Sebagai solusi, politisi NasDem itu mengutip apa disampaikan Wali Kota Makassar terkait pentingnya penguatan layanan transportasi. Dimana, wilayah yang sulit dijangkau akan menjadi prioritas penyediaan transportasi khusus bagi siswa. “Kita akan lihat kemungkinan menambah armada angkutan pelajar di daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” jelas Ari

Fraksi PPP Siap Bersinergi dengan Pemkot Makassar

Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan, Imam Fauzan Amir Uskara, bersama jajaran Fraksi PPP DPRD Kota Makassar dan Rahmat Taqwa Qurais, melakukan audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Rabu (9/7/2025).

Imam Fauzan Amir Uskara menekankan bahwa pertemuan ini bukan yang terakhir. Akan ada kelanjutan bentuk silaturahmi.

"Kami kesini menyampaikan perubahan struktur fraksi PPP di DPRD. Kami percayakan pak RTQ), tentu akan terus menjalin komunikasi dan memastikan kerja-kerja politik PPP di DPRD selaras dengan Pemerintah Kota untuk kepentingan masyarakat," singkatnya.

Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Makassar, Rahmat Taqwa Qurais menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan jalur komunikasi antara Fraksi PPP dan Pemerintah Kota Makassar berjalan lebih terarah dan satu pintu.

la menambahkan, Fraksi PPP berkomitmen mendukung visi-misi Wali Kota Makassar dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai koridor undang-undang.

"Kami mau fokus agar program Pak Wali berjalan baik. Kami di DPRD akan mengawasi dan memastikan kebijakan pro-rakyat terlaksana," katanya.

RTQ juga menyebutkan beberapa program

prioritas yang akan menjadi titik kolaborasi antara PPP dan Pemerintah Kota, di antaranya pengembangan kesejahteraan guru mengaji.

"Serta penguatan ekonomi kerakyatan, dan penanganan persoalan lingkungan seperti masalah sampah dan air bersih," tuturnya.



Fraksi PKS Tinjau Dampak Reformasi Perumda terhadap Peningkatan PAD



Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar akan mencermati sejauh mana reformasi yang dilakukan pemerintah kota terhadap sejumlah Perusahaan Daerah (Perumda) berdampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saat ditemui wartawan Selasa (1/7/2025), Sekretaris Fraksi PKS DPRD Makassar, Hartono mempertanyakan apakah langkah-langkah tersebut, termasuk efisiensi dan rasionalisasi pegawai, benar-benar berdampak pada naiknya setoran deviden ke kas daerah.

Sebagai contoh, ia menyinggung PDAM yang disebut telah melakukan rasionalisasi dengan memangkas sekitar 400 pegawai. Menurutnya, pengurangan jumlah karyawan tentu akan menurunkan biaya operasional.

Karena seharusnya dapat dialihkan menjadi tambahan penerimaan. Olehnya itu, ia menekankan pentingnya memastikan bahwa efisiensi tersebut juga diikuti dengan peningkatan pendapatan dari sektor tersebut.

“Itu juga nanti kita akan lihat, apakah ada gunanya terhadap peningkatan pendapatan. Kalau ternyata tidak, maka kita akan mengatakan, lebih baik pekerjaan banyak orang, hasilnya segitu, daripada sudah kurang orang, tapi hasilnya masih segitu,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti efisiensi di Perumda lain seperti PD Pasar, yang disebut turut melakukan pengurangan pegawai. Hartono menegaskan bahwa penghematan yang dilakukan harus memberikan dampak langsung terhadap kenaikan pendapatan daerah, bukan sekadar mengurangi jumlah tenaga kerja.

“Efisiensi penting. Tapi efisiensi itu, hasilnya harus dirasakan oleh masyarakat, melalui peningkatan pendapatan pemerintah kota, dari sektor perusahaan daerah yang digunakan untuk membangun kota,” pungkasnya.

Andi Makmur Burhanuddin Tegaskan Komitmen terhadap Dunia Pendidikan

K Dalam upaya mendorong pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pendidikan di Kota Makassar, anggota DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, SE, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Kegiatan ini berlangsung pada hari Sabtu, bertempat di Royal Bay Hotel, Jalan Sultan Hasanuddin No. 24, dan dihadiri oleh sejumlah warga, tenaga pendidik, serta tokoh masyarakat.

Dalam berbagai hal, Andi Makmur Burhanuddin menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan merata.

“Perda ini hadir bukan hanya sebagai payung hukum, tetapi juga sebagai komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap anak di Makassar mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar pelaksanaan perda tidak berhenti pada tataran formal. “Kami ingin masyarakat memahami substansi perda ini dan turut aktif menyaksikan implementasinya di lapangan,” tambahnya.

Narasumber pertama, Fitriani Marddin, SE, memaparkan bahwa perda ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk peran orang tua, pengelolaan satuan pendidikan, hingga upaya peningkatan mutu guru.

“Salah satu poin penting dalam perda ini adalah bagaimana membangun tanggung jawab kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan,” jelasnya.

Sementara itu, narasumber kedua, Andi Wahyuni Ilyas, menekankan urgensi pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh melalui penerapan perda ini. “Tidak cukup hanya membangun sekolah, tetapi bagaimana kualitas pembelajaran dan penguatan karakter siswa juga harus menjadi perhatian,” ujarnya.





Adi Akbar Sosialisasikan Perda Penyelenggaraan Pendidikan

Anggota DPRD Kota Makassar, Adi Akbar, S.Pd, MM, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Angkatan ke-VI, di Karebosi Premier Hotel, Jalan Jenderal M. Yusuf No. 1, Kota Makassar, Selasa 22 Juli 2025.

Dalam sosialisasi hari ini, menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr. Syarifuddin, S.Pd, M.Pd (Kabid SMP Disdik Kota Makassar) dan Kurniati, S.STP (Kabid SD Disdik Kota Makassar)

Dalam pemaparannya, Adi Akbar menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar penyebarluasan regulasi, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi dengan warga di daerah pemilihannya.

"Ini momentum untuk lebih dekat dengan warga, membangun komunikasi yang baik, serta menyerap aspirasi secara langsung," ujar Legislator Fraksi Partai PKS tersebut.

Selain itu, ia menyampaikan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Perda tentang penyelenggaraan pendidikan. Padahal, regulasi ini menjadi landasan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak dan merata.

"Perda ini mengatur banyak hal, termasuk hak siswa SD dan SMP, serta program beasiswa bagi anak yang membutuhkan. Harus ada kesadaran bersama bahwa pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh diabaikan," jelasnya.

Sebagai anggota Komisi D DPRD Makassar yang membidangi pendidikan, Adi Akbar menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada akses pendidikan bagi semua anak.



Idris Gelar Sosialisasi Perda Perlindungan Masyarakat



Anggota DPRD Kota Makassar, Idris menyebut demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, dibutuhkan kerjasama antar semua pihak. Hal itu juga demi terciptanya suasana yang harmonis dalam meningkatkan ketentraman dan perlindungan masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Pernyataan tersebut disampaikan Idris saat sosialisasi penyebaran Perda nomor 7 tahun 2021 tentang Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, di Hotel Sorison Makassar, Jl Perintis Kemerdekaan, Selasa, 29 Juli 2025.

Menurutnya, persoalan yang sering terjadi ditengah masyarakat adalah perselisihan antara aparat keamanan dengan warga atau pedagang kaki lima yang ada dibilangan jalan. "Misalnya jika ada pengrusakan, secara aturan apa yang dilakukan oleh satpol PP itu benar, namun disini lain kita juga kasihan kepada pedagang di pinggir jalan karena mencari rezeki," ujarnya.

Karena itu, kata Legislator Gerindra Makassar ini perlu saling bekerjasama dalam menjalankan tugas dan fungsi bagi aparat penegak keamanan dalam mengamankan setiap situasi dan kondisi yang bisa menghambat semua jalannya aktivitas.

"Tentunya apa yang menjadi kepentingan masyarakat pasti saya perjuangkan di pemerintahan kota, sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat lain," ungkapnya.

Disisi lain, Babra Kamal yang menjadi Narasumber, memaparkan tugas aparat penertiban dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum adalah memberikan perlindungan masyarakat.

"Kalau kita berhadapan dengan masyarakat dibawah pasri bersikap humanis, jangan arogan. Jadi kalau ada anggota kami turun di lapangan tolong dibantu agar jalannya ketertiban umum bisa berjalan baik," paparnya.



Sosialisasi Perda Kepemudaan, Anwar Faruq Ajak Pemuda Aktif Bangun Makassar

Anggota DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq, S.Kom., MM., menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan yang berlangsung di Grand Asia Hotel Makassar.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah. Acara yang dipandu oleh moderator Rini Susanty, SE, menghadirkan tiga narasumber kompeten yang memaparkan isi dan urgensi regulasi tersebut.

Dalam sambutannya, Anwar Faruq menekankan pentingnya sosialisasi perda ini agar generasi muda tidak hanya mengetahui haknya, tetapi juga memahami tanggung jawab sosialnya sebagai bagian dari pembangunan kota.

Narasumber pertama, Andi Rahmat, S.STP, M.Si, menjelaskan secara sistematis isi Perda Kepemudaan dan bagaimana regulasi ini memberi ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi aktif.

“Perda ini bukan hanya soal pemberdayaan, tapi juga tentang pembentukan karakter dan integritas pemuda sebagai agen perubahan,” ungkapnya. Ia juga menambahkan, “Pemerintah daerah telah menyediakan platform melalui kebijakan ini, tinggal bagaimana kita semua bisa memanfaatkannya secara maksimal.”

Narasumber kedua, Muhammad, ST, lebih menyoroti aspek teknis dan dukungan infrastruktur kepemudaan. “Kita berbicara tentang kolaborasi lintas sektor. Pemuda membutuhkan ekosistem yang mendukung, mulai dari fasilitas hingga akses pembinaan,” tuturnya.

Sementara itu, narasumber ketiga, Abdul Aziz Anwar, Lc, mengupas aspek moral dan spiritual dari peran pemuda. “Kepemudaan bukan sekadar usia muda, tapi tentang semangat perubahan dan nilai-nilai yang dibawa dalam gerakan sosial,” ujarnya. Ia menambahkan, “Kalau pemuda kita kuat secara moral dan spiritual, maka pembangunan daerah akan memiliki fondasi yang kokoh.”



Hj Irmawati Sila

Dorong Pemuda Melek Regulasi

Komitmen untuk memberdayakan generasi muda terus digelorakan oleh Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Irmawati Sila. Bertempat di Khas Hotel Makassar, Jumat (18/7/2025), Hj Irmawati melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, sebagai bentuk edukasi sekaligus ajakan agar pemuda Makassar lebih sadar peran dan potensi mereka.

Sosialisasi ini merupakan bagian dari sinergi antara DPRD Makassar dan Pemerintah Kota Makassar dalam menyebarkan regulasi daerah yang berkaitan langsung dengan masyarakat, khususnya kalangan pemuda.

Dalam pemaparannya, Hj Irmawati menekankan bahwa Perda Kepemudaan bukan sekadar produk hukum, melainkan panduan sekaligus pelindung bagi pemuda untuk berkembang dan berdaya saing.

"Perda ini sangat penting. Banyak yang belum tahu, usia pemuda dalam aturan ini adalah 15 hingga 30 tahun. Saya ingin agar pemuda di daerah pemilihan saya menjadi orang-orang hebat ke depannya," ujarnya penuh semangat.

Politisi perempuan dari Dapil V Makassar ini juga menyampaikan bahwa Perda Kepemudaan dibentuk atas dasar mandat undang-undang nasional. Maka dari itu, seluruh pemerintah kabupaten/kota, termasuk Makassar, berkewajiban merumuskan regulasi daerah yang berpihak pada pemuda.

"Saya juga pernah muda, dan saya tahu bagaimana semangat itu penting. Di usia 21 tahun saya sudah aktif dalam berbagai organisasi dan duduk menjadi Legislator muda di tanah kelahiran saya di Jeneponto. Saya ingin memotivasi anak-anak muda hari ini agar mereka tahu, bahwa mereka punya potensi besar untuk sukses," tambahnya.

Meinsani Kecca Ajak Warga Makassar Jaga Ruang Terbuka Hijau

Anggota DPRD Makassar, Meinsani Kecca menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Bertempat di Hotel Harper, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kamis (24/7/2025).

Legislator dari Fraksi PPP itu mengundang dua narasumber dalam sosialisasi ini, di antaranya Anggota DPRD Sulsel Salman Alfariz Karsa dan Analisis Kesbangpol Makassar Hari.

Melalui sosialisasi Perda RTH, Meinsani mengajak masyarakat untuk menjaga RTH yang ada di Makassar. Dia menegaskan tidak boleh ada kerusakan demi lingkungan yang berkelanjutan. "Makanya ini yang perlu kita perhatikan semua. Kalau kita mulai menjaga, maka semua akan ikut," ujarnya.

Dia juga mengatakan RTH harus dijaga bersih dan rapi. Jika ada usaha yang berjualan, hal itu harus dikoordinasikan oleh dulu kepada Lurah maupun RT dan RW. "Jangan sampai ini membuat RTH sementara Lurah tidak pernah

melihat situasinya," ucap Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat ini.

Olehnya, dia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga RTH. Tidak melulu mengandalkan pemerintah setempat. "Kebetulan kita akan adakan pemilihan RT dan RW jadi pilih memang maki yang peduli sama lingkungan," tukas Meinsani.

Sementara itu, Anggota DPRD Sulsel, Salman Alfariz Karsa menilai perda RTH ini harus direvisi. Sebab sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. "Kalau memang dilihat keluhan masyarakat, bagaimana ada usaha di RTH dan lain-lain itu harus sudah direvisi perda," ujarnya.

Demikian juga yang disampaikan Analisis Kesbangpol Makassar Hari. Namun saat ini, perda yang ada harus dipatuhi oleh masyarakat dan dijalankan dengan baik oleh pemerintah. "Perda ini wajib dilaksanakan dan harus berjalan," tutup Hari.



Muhammad Farid Rayendra: Perda Pengawasan Alkohol Harus Ditegakkan Bersama



Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Farid Rayendra, SE, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Liberta Grand Sayang, Jalan Manunggal 22 Makassar, dan menghadirkan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait peran aktif masyarakat dalam mengawasi distribusi minuman beralkohol.

Muhammad Farid Rayendra dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sosialisasi ini agar mengetahui batasan masyarakat serta regulasi yang berlaku. "Minuman beralkohol bukan hanya masalah peredaran darah, tapi juga berkaitan langsung dengan keamanan dan ketertiban umum. Perda ini hadir untuk menjaga keseimbangan tersebut," ujarnya dalam pembukaan acara.

Narasumber pertama, Zulkifli Aljahori, SIP., MH, menyampaikan bahwa Perda ini menjadi salah satu instrumen hukum daerah yang mengatur secara teknis izin dan pengawasan pelaku terhadap usaha yang memperdagangkan minuman beralkohol. "Pengawasan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga warga yang melihat langsung dampak sosialnya," ujarnya.

Sementara itu, narasumber kedua, Firman Wahab, S.IP., M.Adm.KP, menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi dalam pengawasan lapangan. "Tindakan pengendalian minuman beralkohol itu bukan hanya soal regulasi, tapi juga kolaborasi. Kalau tidak ada kerja sama lintas sektor, maka pengawasan akan pincang," katanya.





Nasir Rurung Tekankan Pentingnya ASI Eksklusif untuk Anak

Legislator DPRD Kota Makassar, Nasir Rurung, mengingatkan agar para ibu untuk tidak memberikan susu formula. Ia meminta ASI eksklusif tetap diberikan sesuai ketentuan.

Hal itu disampaikan Nasir Rurung saat menggelar Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, angkatan 9, di Hotel Grand Town, Jalan Pengayoman, Kamis (31/07/2025).

“Sosialisasi ini penting agar tidak memberikan susu selain ASI. Ini wajib hingga 2 tahun, ketika pemberian ASI dilakukan akan melahirkan generasi berkualitas,” ungkap NR.

Ia menambahkan, ASI bukan hanya bernilai gizi tinggi, tetapi juga menjadi pondasi kesehatan anak sejak dini. Dengan pemenuhan ASI eksklusif, risiko stunting dan berbagai penyakit dapat ditekan.

Selain itu, pemberian ASI diyakini mampu meningkatkan kecerdasan emosional maupun intelektual anak. Ia juga menjelaskan pemberian ASI bisa mendekatkan dan merekatkan hubungan antara orang tua dan anak.



Fahrizal Arrahman Husain Dorong Solusi untuk Siswa Tak Lulus SPMB

Komisi D DPRD Kota Makassar telah merampungkan agenda monitoring dan evaluasi (Monev) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) dan program seragam gratis tahun ajaran 2025.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, mengungkapkan bahwa SPMB telah berjalan sesuai prosedur dan petunjuk teknis yang berlaku.

Hasil seleksi juga dinilai transparan karena dapat langsung diakses masyarakat melalui laman resmi, lengkap dengan peringkat dan batas penerimaan berdasarkan jalur yang dipilih.

Meski demikian, Fahrizal mengakui pihaknya mempertanyakan nasib peserta yang belum lulus. "Kami sudah tanyakan apakah akan ada penambahan kuota," ujarnya Senin (14/7/2025).

Komisi D DPRD Kota Makassar telah merampungkan agenda monitoring dan evaluasi (Monev) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) dan program seragam gratis tahun ajaran 2025.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, mengungkapkan bahwa SPMB telah berjalan sesuai prosedur dan petunjuk teknis yang berlaku.

Hasil seleksi juga dinilai transparan karena dapat langsung diakses masyarakat melalui laman resmi, lengkap dengan peringkat dan batas penerimaan berdasarkan jalur yang dipilih.

Meski demikian, Fahrizal mengakui pihaknya mempertanyakan nasib peserta yang belum lulus. "Kami sudah tanyakan apakah akan ada penambahan kuota," ujarnya Senin (14/7/2025).





Ray Minta Pemkot Terlibat dalam Pengembangan Pusat Kuliner Pasar Cidu

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad meminta Pemkot Makassar serius dalam pembenahan Pusat kuliner di Pasar Cidu, Jalan Tinumbu, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah.

Menurutnya, peran aktif pemerintah sangat penting agar kawasan ini tetap berkembang sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Sebab, Pasar Cidu bukan sekadar tempat makan biasa, melainkan telah menjelma menjadi ikon wisata kuliner yang tumbuh dari inisiatif masyarakat setempat.

“Kuliner Pasar Cidu itu adalah sebuah fenomena yang muncul dari bawah. Jadi masyarakat di wilayah utara Makassar itu memang punya kemampuan, kemampuan khusus untuk mengelola makanan untuk bisa menjadi bagus untuk diperdagangkan,” ujarnya, Selasa (22/7/2025).

Fenomena kuliner di Pasar Cidu, lanjut Ray, tumbuh secara organik dari kreativitas warga yang menawarkan makanan enak dengan harga terjangkau. Hal ini menarik minat banyak orang, termasuk wisatawan lokal maupun mancanegara.

“Bahkan orang-orang di luar kota, bahkan ada beberapa turis mancanegara itu datang ke sana. Karena memang menjadi unik lah. Kemudian, menjadi unik menjadi fenomenal,” tambahnya.

Namun sayangnya, menurut Ray, hingga kini belum ada perhatian serius dari pemerintah untuk mengelola potensi besar ini secara sistematis.

Ia menyoroti kurangnya dukungan dari segi keamanan, kebersihan, hingga penataan ruang kawasan tersebut. Padahal, kata dia, potensi ekonomi yang bisa dihasilkan sangat besar jika pemerintah turun tangan langsung.

Solusi Urai Kemacetan, Legislator Dukung Pembangunan Jembatan Barombong

Langkah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam mendorong pembangunan Jembatan Barombong mendapat dukungan penuh dari Sekretaris Komisi B DPRD Makassar, Andi Tenri Uji Idris.

Dukungan ini menjadi sinyal penting bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif akan mempercepat terwujudnya infrastruktur vital untuk mengurai kemacetan.

Andi Tenri Uji, mendorong percepatan pembangunan jembatan baru di kawasan tersebut sebagai solusi permanen atas kemacetan yang telah lama dikeluhkan warga. Sebagai legislator dari daerah pemilihan Barombong, ia menilai pembangunan ini sangat mendesak.

Pertumbuhan permukiman di Barombong yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir menjadikan kawasan ini sebagai salah satu titik kemacetan terpadat, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari.

“Saya turut senang mendengar rencana pembangunan jembatan baru di Barombong. Ini adalah kebutuhan mendesak yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat,” ujar Tenri Uji, Senin (28/7/2025).



Ia menjelaskan bahwa jembatan lama di kawasan tersebut kini tak lagi mampu menampung volume kendaraan yang terus meningkat seiring pembangunan perumahan.

Karena itu, kehadiran jembatan baru diharapkan menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi kemacetan harian. Meski demikian, Tenri Uji mengingatkan bahwa proses pembebasan lahan menjadi tahapan penting yang tak boleh diabaikan. Ia berharap hal ini dilakukan secara adil, tanpa merugikan warga.

Sebagai wakil rakyat, ia menyampaikan apresiasi atas komitmen Wali Kota Makassar yang telah memperjuangkan proyek ini, merespons keluhan warga yang kerap ia dengar saat turun langsung ke lapangan.

Tri Sulkarnain Soroti Lemahnya Penyelesaian Sengketa Tanah

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain, mengingatkan pentingnya peran aktif seluruh perangkat daerah, terutama Dinas Pertanahan, dalam menuntaskan program-program strategis yang telah ditetapkan.

Ia menyoroti persoalan konflik pertanahan yang masih kerap muncul di tengah masyarakat. Tri menyatakan bahwa penyelesaian sengketa tersebut membutuhkan pendekatan yang responsif dan efisien, dengan mengedepankan jalur mediasi.

“Banyak masyarakat yang menghadapi persoalan tanah, baik itu masalah kepemilikan, batas lahan, maupun hak atas tanah. Kami melihat bahwa Dinas Pertanahan perlu mengambil peran lebih aktif untuk menjembatani ini melalui mediasi yang adil dan solutif,” ujarnya, Rabu (23/7/2025).

Ia menggarisbawahi bahwa upaya mediasi belum terlaksana secara maksimal, yang menurutnya bisa disebabkan oleh kendala anggaran. Oleh karena itu, ia mendorong agar persoalan keterbatasan dana bisa menjadi perhatian dalam proses evaluasi dan penyusunan anggaran perubahan.

“Kalau memang anggaran mediasi belum mencukupi, mungkin bisa dibuka ruang untuk didiskusikan dalam APBD-P. Yang penting, kita ingin memastikan masyarakat mendapat kepastian atas hak-haknya,” tuturnya.



Tak hanya soal pertanahan, Tri juga mengingatkan perangkat daerah agar tidak menunda pelaksanaan program kerja hingga akhir tahun. Menurutnya, kebiasaan menumpuk kegiatan di akhir tahun anggaran justru berdampak buruk terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan pelayanan publik.

“Kami memahami ada banyak tantangan teknis, tapi akan lebih baik jika program bisa dijalankan lebih awal agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat. Kalau terlalu banyak tertumpuk di akhir tahun, yang rugi tentu bukan hanya pemerintah, tapi juga warga Kota Makassar,” ucapnya.

Ia berharap koordinasi lintas sektor dapat ditingkatkan dan setiap perangkat daerah mampu bekerja dengan sigap serta memiliki empati terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait perlindungan hak atas tanah.



Transparansi SPMB Tuai Sorotan Legislator

Ari Ashari Ilham

Aduan masyarakat terkait transparansi sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Makassar mulai mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, bersama jajarannya melakukan peninjauan langsung ke sekolah-sekolah yang dilaporkan bermasalah dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik.

"Jadi banyak aduan dari masyarakat terkait transparansi dari sistem penerimaan di sekolah-sekolah. Saya sempat turun di SD Percontohan Negeri PAM untuk melakukan pemeriksaan, tetapi kepala sekolahnya lagi mengikuti pelatihan, jadi tidak ada di tempat," ujarnya, Selasa (8/7/2025).

Ia menjelaskan, pihaknya ingin melakukan pengecekan langsung terhadap dokumen dan data penerimaan murid, khususnya pada jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Namun, belum dapat dilanjutkan lantaran kepala sekolah tidak berada di lokasi.



"Kami meminta data-datanya untuk kami melakukan random cek terkait transparansi sekolah ini. Mungkin dalam waktu dekat kami akan turun kembali untuk meminta keterangan dari kepala sekolahnya," ujarnya.

Menurut Ari, seharusnya sistem aplikasi yang digunakan dalam SPMB dapat menyajikan data secara transparan dan valid, sehingga publik bisa mengawasi jalannya proses seleksi secara terbuka. "Kita melihat bahwa dari sistem aplikasi ini kan seharusnya data-data yang diupload nanti itu kita bisa melihat tingkat validasinya," tegasnya.

SD Percontohan Negeri PAM yang terletak di samping kantor PDAM, Jalan Ratulangi, disebut sebagai salah satu sekolah percontohan yang semestinya menjadi teladan dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.

Selain SD, Ari juga menyoroti proses penerimaan murid di jenjang SMP. Ia menyebutkan bahwa tahap jalur domisili telah rampung, dan saat ini memasuki tahap jalur non-domisili yang berlangsung hingga Sabtu.

"Nanti kami pasti akan turun juga untuk melakukan sampel di berbagai sekolah SMP, untuk bagaimana memastikan bahwa penerapan SPMB ini sesuai dengan harapan masyarakat," ujarnya.

Muchlis Misbah Harap Penambahan Kuota Rombel Dapat Terwujud



Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengingatkan bahwa penumpukan siswa di sekolah-sekolah favorit seperti SMP Negeri 3 seharusnya tidak terjadi karena masih banyak sekolah negeri lain yang belum terpenuhi kuotanya.

Ia pun meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk segera melakukan penambahan rombongan belajar (rombel) dan mengatur sistem pemerataan. Wali Kota menekankan bahwa seluruh sekolah negeri di Makassar sebaiknya memiliki standar unggulan yang merata.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah turut mendorong adanya penambahan kuota dan rombel di sekolah negeri agar semua siswa dapat terakomodir dalam proses belajar.

"Kalau bisa juga ada penambahan kuota rombel. Tadi kami RDP berharap dari Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan agar ada penambahan supaya semua siswa bisa terakomodir untuk belajar di Kota Makassar," ujarnya Selasa (22/7/2025).

"Meskipun ada beberapa SMP yang memang betul-betul belum penuh kuotanya. Oleh karena itu, teman-teman bisa ambil datanya di Dinas Pendidikan sekolah-sekolah mana saja yang belum penuh kuotanya untuk bisa diisi," jelas Muchlis.

Ia juga membenarkan bahwa saat ini masih ada siswa yang belum mendapatkan tempat di sekolah, terutama di sekitar beberapa SMP yang menjadi favorit. "Ada siswa yang belum mendapat sekolah di sekitar SMP-SMP. Seperti SMPN 8, SMPN 6, SMPN 3, dan SMPN 1, SMPN 2, SMPN 22," katanya.

Muchlis pun secara khusus menyoroti daerah pemilihan V, terutama wilayah Rappokalling yang dinilai memerlukan penambahan sekolah negeri baru. Menurutnya, SMPN 44 dan SMPN 22 di wilayah tersebut tidak lagi mampu menampung jumlah pendaftar.

"Sehingga ke depan Pemkot diharapkan untuk area kecamatan Tallo dan Bontoala itu ada penambahan SMP. Karena SMPN 22 dan SMPN 44 sudah tidak bisa mencover," jelasnya.

Disdik Makassar Pastikan SPMB 2025 Transparan, Tak Ada Titip-Menitip

Menanggapi tuduhan dugaan praktik titip-menitip dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 yang disuarakan oleh salah satu organisasi masyarakat. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar dengan tegas menyatakan bahwa proses seleksi telah dilakukan secara terbuka, adil, dan sesuai aturan.

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan juga menghormati setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi, namun memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pusat dan dapat dipantau secara daring melalui website resmi sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menegaskan dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025. Seluruh proses penerimaan siswa baru dilaksanakan sesuai regulasi dan prinsip keterbukaan informasi.

“Setiap hasil seleksi dapat diakses langsung melalui situs resmi SPMB masing-masing sekolah. Ini komitmen kami untuk memastikan transparansi data dan akuntabilitas proses penerimaan,” ujar Achi Soleman, Selasa (15/7/2025).

Dia menegaskan, komitmen terhadap integritas dan keterbukaan, Disdik memastikan seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan secara transparan, berbasis sistem daring, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Ia juga meluruskan bahwa, pihak Dinas Pendidikan mengajak para demonstrasi agar duduk bersama dan membahas apa yang menjadi pokok permasalahan. Namun, tak-



direspons para pendemo. “Padahal kami di Disdik siapkan data untuk paparan sesuai apa menjadi aspirasi pendemo,” jelasnya, meluruskan tuduhan yang berkembang.

Achi menjelaskan bahwa mekanisme SPMB tahun 2025 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, yang mengatur penerimaan murid baru jenjang PAUD, SD, dan SMP.

Selain itu pelaksanaan berbasis prinsip transparansi. Dimana kata dia, SPMB dijalankan melalui jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Seluruhnya mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pemkot Makassar Salurkan Seragam Sekolah Gratis, Munafri: Bantu Ringankan Beban Orang Tua

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar resmi memulai penyaluran seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Senin (21/7/2025).

Distribusikan seragam sekolah gratis kepada siswa baru tingkat SD dan SMP, sebagai bagian dari realisasi visi besar Makassar untuk Semua dalam program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah).

Tahap perdana, penyerahan ratusan seragam kepada siswa baru, dilakukan di SD Lariang Bangi dan SMP Negeri 46 Makassar, Senin (21/7/2025).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung menyerahkan secara simbolis dua stel seragam seragam utama pakaian merah putih (SD) dan biru-putih (SMP).

Turut mendampingi Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa Mahmud, Sekda Makassar A. Zulkifly Nanda, Kepala Dinas Pendidikan-

Makassar, serta jajaran pimpinan OPD terkait.

Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa program seragam gratis merupakan prioritas unggulan pemerintah kota dalam sektor pendidikan.

“Program ini bukan sekadar membagikan pakaian, tapi upaya nyata meringankan beban ekonomi orang tua siswa serta mendorong pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kota Makassar,” tegas Munafri.

Program seragam gratis ini diharapkan menjadi tonggak awal peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh di Kota Makassar.

“Semoga program ini membawa keberkahan, dan menjadi pemicu semangat kita semua untuk menjadikan pendidikan sebagai pondasi utama kemajuan Kota Makassar,” ungkap Munafri.





Prabowo Soroti Praktik Ekonomi yang Menyimpang

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya terhadap amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, saat menyampaikan sambutan dalam peringatan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center, Rabu (23/7/2025).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak, guna menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Pasal 33 ini senjata pamungkas. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," ujarnya.

Presiden secara khusus menyoroti sektor pangan, seperti beras, jagung, dan minyak goreng, sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang tidak seharusnya dibiarkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Sebagai bentuk kritik terhadap praktik ekonomi yang menyimpang, Prabowo memperkenalkan istilah baru yang ia sebut "serakahnomics". Istilah ini mencerminkan kekhawatiran Presiden terhadap maraknya penyimpangan ekonomi akibat keserakahan oknum tertentu.

Prabowo mencontohkan kasus beras subsidi yang dikemas ulang sebagai beras premium, lalu dijual dengan harga lebih tinggi. Praktik ini menurut Presiden bukan hanya tidak etis, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana.

"Sekarang saya tanya, kalau produksi beras, ini hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi jagung, hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi minyak goreng, hajat hidup orang banyak enggak? Bagaimana Indonesia produsen minyak goreng, produsen kelapa sawit terbesar di dunia, terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng hilang, langka?" ujarnya.

Debut Global Indonesia di BRICS, Prabowo Tancapkan Pengaruh Internasional

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menandai kehadiran bersejarah dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu, 6 Juli 2025.

Momen ini menjadi tonggak penting bagi diplomasi Indonesia karena untuk pertama kalinya, Indonesia hadir sebagai anggota penuh dalam kelompok ekonomi besar tersebut.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa langkah bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS tidak lepas dari dorongan langsung Presiden Prabowo pada awal masa kepemimpinannya.

“Masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo di tahun pertamanya menjadi Presiden Republik Indonesia, dan disambut baik oleh seluruh anggota BRICS. Indonesia pun diterima dengan cepat menjadi anggota ke-11 BRICS,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.



Keanggotaan penuh Indonesia melengkapi formasi BRICS yang kini mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Etiopia, Iran, dan Indonesia.

Dengan susunan ini, BRICS kini mewakili separuh populasi dunia dan menyumbang sekitar 35 persen dari total GDP global. Presiden Prabowo sendiri menilai langkah ini sebagai strategi penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam dinamika global.



“Presiden Prabowo optimistis dengan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global, serta menekankan pentingnya kerja sama antarnegara melalui forum seperti BRICS untuk mendukung stabilitas dan kemakmuran dunia,” kata Seskab Teddy.

Manfaat

Air Kelapa untuk yang Suka Jogging

Memahami kebutuhan cairan tubuh merupakan hal penting bagi setiap pelari. Namun, mari bersikap jujur. Air putih bukan satu-satunya pilihan untuk menghilangkan dahaga, apalagi setelah berlari jauh.

Ada satu minuman alami yang mulai mendapat tempat dalam dunia lari dan kebugaran: air kelapa. Meskipun kini tersedia berbagai jenis minuman olahraga di pasaran, mengetahui mana yang paling mendukung pemulihan dan kesehatan tetap krusial.

Air kelapa, khususnya yang alami dan tanpa tambahan konsentrat, ternyata mampu bersaing dalam hal rehidrasi. Sebuah studi dalam jurnal *International Society of Sports Nutrition* menemukan bahwa air kelapa dapat memberikan efek hidrasi yang setara dengan minuman olahraga yang mengandung karbohidrat dan elektrolit.

Menurut Kelly Jones, MS, RD, CSSD, seorang ahli diet olahraga dari Newtown, Pennsylvania, yang dikutip dari *runnersworld.com*, air kelapa sering dipuji karena kandungan kaliumnya yang tinggi—sekitar 400 miligram per cangkir, jumlah yang hampir sama dengan kalium dalam sebuah pisang ukuran sedang.

Kalium bukan hanya membantu menurunkan tekanan darah, tapi juga penting untuk menjaga fungsi otot dan hidrasi yang optimal. Namun, manfaat kalium tidak akan maksimal jika tidak diimbangi dengan asupan natrium yang cukup.

Yasi Ansari, MS, RDN, CSSD, spesialis dietetika olahraga dan juru bicara *Academy of Nutrition and Dietetics*, yang dikutip dari *runnersworld.com* menambahkan bahwa kalium bukan satu-satunya elektrolit dalam air kelapa.

Di dalamnya juga terkandung sejumlah kecil magnesium, kalsium, dan fosfor. Elektrolit ini penting untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang melalui keringat dan urine, terutama saat berlari di cuaca panas atau lembap.

Mengapa Orang Hobi Mengoleksi Prangko?



Mengoleksi prangko adalah hobi yang unik namun digemari oleh jutaan orang di seluruh dunia. Menurut royalcollege.lk, diperkirakan ada lebih dari 20 juta kolektor prangko secara global.

Hal ini menandakan bahwa aktivitas ini terus memiliki daya tarik lintas generasi dan budaya. Lalu, apa yang membuat orang rela menghabiskan waktu untuk mengumpulkan benda kecil ini? Berikut lima alasan utamanya, dikutip dari royalcollege.lk dan thepostedstamp.com:

Memberi kepuasan hidup lewat hal sederhana

Hobi ini mudah dilakukan siapa saja, praktis disimpan, dan tidak memakan banyak ruang. Mengoleksi prangko bisa menghadirkan rasa puas, bahagia, bahkan nilai sentimental karena dapat mengingatkan pada kenangan indah masa lalu.

Daya tarik visual dan nilai artistik

Prangko memiliki daya tarik visual dan nilai artistik tinggi, menjadikannya layak dikoleksi. Desainnya yang indah—mulai dari gambar hewan lucu hingga pemandangan menawan—menjadikan prangko seperti karya seni mini.

Sarana pendidikan yang menyenangkan

Mengoleksi prangko bukan sekadar hobi, tapi juga sarana pendidikan yang kaya manfaat. Setiap prangko membuka jendela ke dunia—memperkenalkan budaya, sejarah, geografi, dan tokoh penting dari berbagai negara.

Manfaat finansial

Selain nilai sentimental dan edukatif, prangko juga bisa menjadi investasi. Beberapa prangko langka memiliki nilai jual tinggi, apalagi jika disimpan dalam kondisi optimal. Koleksi yang tepat bisa menjadi aset bernilai di masa depan.

Manfaat sosial

Dunia filateli menawarkan ruang interaksi yang luas. Kolektor bisa bergabung dengan klub atau komunitas, berpartisipasi dalam pertemuan rutin, bertukar ide, hingga menjalin pertemanan dengan orang-orang dari berbagai negara.

Profil Rahmat Taqwa Quraisy, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar

Rahmat Taqwa Quraisy, anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, adalah sosok yang ditempa oleh perjalanan hidup penuh gelombang. Dari lapangan hijau hingga panggung politik, ia melangkah dengan jejak yang mengakar dalam sejarah dan warisan keluarga.

Ia adalah putra dari Alm. H. Baco Ahmad, legenda sepak bola era 1960-an yang pernah membela Timnas Indonesia dan Persija, membawa semangat bangsa di setiap tendangannya. Di bawah permintaan Wali Kota Makassar kala itu, Patompo, sang ayah pun bergabung dengan PSM Makassar, meskipun takdir tak memberinya gelar juara.

Namun, semangat lapangan itu tak pernah pudar; ia menjelma menjadi warisan hidup yang mengalir ke darah sang putra, Rahmat Taqwa Quraisy. Dari gemuruh stadion hingga gemerlap ruang parlemen, Rahmat menemukan jalannya sendiri.





Meniti Asa di Antara Sepak Bola dan Politik

Merajut Mimpi di Lapangan Hijau

Di awal kariernya, pria yang akrab disapa RTQ itu mengaku ingin mengikuti jejak sang ayah sebagai pesepak bola profesional. Sebagai salah satu dari dua anak laki-laki di keluarga dengan sepuluh saudara perempuan, ia sempat bergabung dengan PSM Junior.

Namun, meskipun memiliki minat besar di dunia sepak bola, ia lebih sering menjadi pemain cadangan dari usia 14 hingga 18 tahun. Akhirnya, ia memilih untuk fokus pada pendidikan, mengambil jurusan hukum di Universitas Hasanuddin (Unhas).

"Akhirnya bapak bilang kepada saya, mau selak bola atau pendidikan. Tidak bisa berjalan duanya. Akhirnya saya pilih pendidikan dan memilih kuliah Strata 1 di Fakultas hukum di Unhas, Strata 1 Fakultas Ekonomi STIE Bung secara bersamaan, Program Magister Hukum Universitas Bosowa dan sekarang sementara melanjutkan program Doktor Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta, Karena seperti saya sepak bola bukan bakat saya," ujarnya.

Meniti Jalan Bisnis, Hukum, dan Politik

Setelah memutuskan untuk berhenti bermain sepak bola, Rahmat menjalani kuliah sambil mencoba berbisnis, kemudian meniti karier sebagai pengacara dan sempat menangani kasus besar di salah satu kabupaten. Hingga suatu saat Rahmat melihat peluang untuk meniti karier di dunia politik.

Rahmat memulai kiprahnya di dunia politik ketika menerima tawaran dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari sekian banyak parpol yang ingin meminangnya.

Melalui PPP, Rahmat akhirnya memberanikan diri untuk maju di Pileg 2019 dan berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Kota Makassar di Dapil 2 Makassar, meskipun awalnya menghadapi keterbatasan dana kampanye. "Saat mau nyaleg sejujurnya saya tidak punya uang. Tapi namanya garis tangan, selalu saja ada jalan untuk setiap usaha keras," ujarnya.

Pecahkan Mitos Politik

Pada Pemilu 2024, Rahmat kembali maju di Dapil 2 Makassar meski sempat kehilangan konsentrasi akibat wafatnya sang ayah pada hari terakhir kampanye. "Akhirnya saya bilang kepada tim dan keluarga cukup satu hari kita berduka dan kita menangkan pertarungan ini," ujarnya saat mengenang perjuangannya untuk terpilih di periode kedua.

Rahmat berhasil bangkit dan berhasil memenangkan pertarungan. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting bagi PPP di Makassar. Karena Rachmat berhasil memecahkan mitos bahwa caleg PPP sulit terpilih dua periode di Dapil 2 Makassar.

"Alhamdulillah untuk pertama kalinya selama beberapa periode PPP berhasil terpilih dua periode atau oppo di Dapil 2 Makassar. Karena orang mengatakan ada mitos bahwa caleg PPP tidak bisa terpilih dua kali di dapil 2," ujarnya.

Data Diri

Nama: Rahmat Taqwa Quraisy

Partai: PPP

Tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 22 September 1990

Jabatan di Partai:

- Ketua Fraksi PPP DPRD kota Makassar
- Ketua Angkatan Muda Kabah Sulawesi Selatan

Jabatan di Legislatif: Anggota Komisi A DPRD Makassar

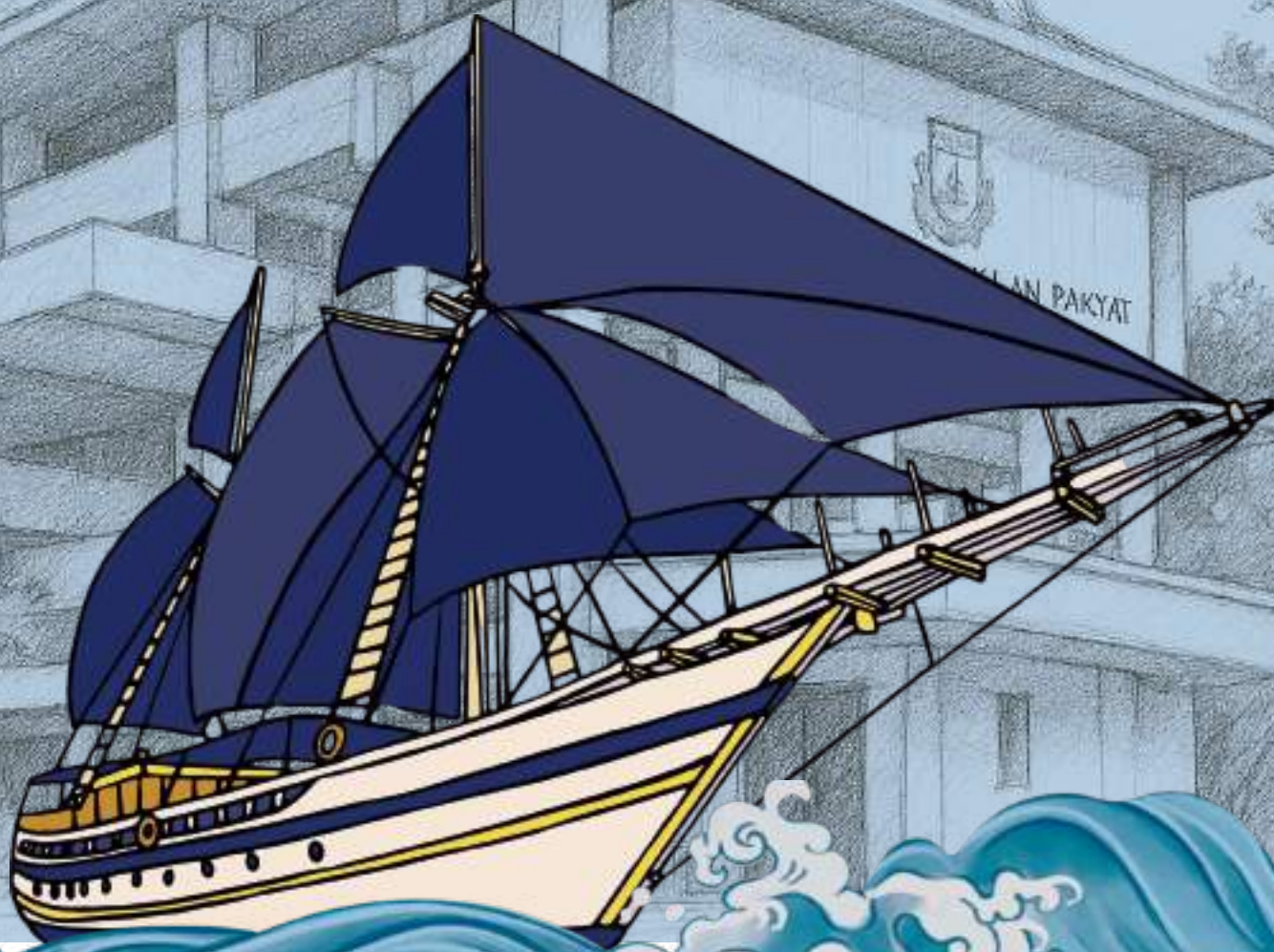
Status: Menikah

Pendidikan: S2



TABLOID **UMAH RAKYAT**

• DPRD KOTA MAKASSAR



@dprd.makassar



@humasdprdmakassar



setwan_dprd.mks



Humas DPRD Makassar

<https://dprd.makassar.go.id>